

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS**

**TAHUN 2008 – 2015 DI KOTA PALOPO**



**IAIN PALOPO**

PENELITI

Dra.Fatmaridah Sabani, M.Ag

NIP.196902082000032001

Penelitian mendapatkan bantuan biaya penelitian dari

DIPA IAIN Palopo tahun 2015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2015**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra.Fatmaridah Sabani., M.Ag.

NIP : 19690208 200003 2 001

Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d

Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan  
Gratis Tahun 2008 – 2015 Di Kota Palopo

Menyatakan dengan sesungguhnya akan menyelesaikan penelitian  
tepat pada waktunya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh  
penyelenggara.

Palopo, 7 Mei 2015

Peneliti



Dra.Fatmaridah Sabani, M.Ag.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt., atas segala limpahan karunia yang tiada terbatas. Shalawat salam tercurah kepada baginda Rasulullah saw, para keluarga dan para sahabat.

Terkait penelitian yang ada di hadapan pembaca, maka perkenankan kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Rektor IAIN Palopo; Dr. Abdul Pirol, M.Ag, yang telah berkenan menyetujui untuk memberikan bantuan biaya penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Juga terima kasih kepada kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Palopo, Dr. Kaharuddin, M.Pd.I., beserta staf yang telah memfasilitasi peneliti sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

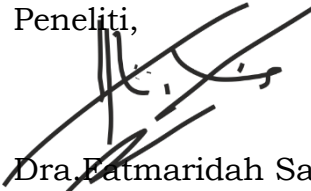
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah kota Palopo yang telah membantu di dalam proses penelitian, juga kepada seluruh teman sejawat yang telah memberikan masukan dan dukungan.

Penelitian ini tentu saja perlu dilanjutkan, sehingga di masa yang akan datang pemahaman tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dilanjutkan atau dikembangkan.

Kepada Allah segala kesempurnaan dan hanya Allah yang maha sempurna.

Wassalam

Palopo, Nopember 2015  
Peneliti,



Dra. Fatmaridah Sabani, M.Ag.  
NIP. 19690208 200003 2 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Penelitian .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Signifikansi Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Riset Sebelumnya .....	7
B. Konsep Evaluasi Program .....	8
C. Pendidikan Gratis dan Indikator Pendidikan Gratis.....	15
D. Kerangka Pikir .....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	25
D. Jenis data dan Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
F. Instrumen Penelitian .....	27
G. Alokasi waktu dan Jadwal penelitian .....	28
H. Analisis Kompetensi Peneliti.....	29


BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Umum Kota Palopo.....	30
B. Pendidikan Gratis di Kota Palopo Tahun 2008-2015 .....	34
C. Implementasi Sasaran dan Tujuan Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kota Palopo .....	41
D. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kota Di Kota Palopo 2008-2015 .....	50
BAB V. PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis Tahun 2008 – 2015 Di Kota Palopo
- b. Bidang Ilmu : Pendidikan Agama Islam
- c. Kategori Penelitian : Penelitian Mandiri
2. Peneliti :
  - a. Nama Peneliti : Dra. Fatmaridah Sabani, M.Ag.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Gol./Pangkat/NIP : Penata TK.I, III/d, 196902082000032001
  - d. Jabatan fungsional : Lektor
  - e. Jurusan/Prodi : Tarbiyah/PGRA
  - f. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
3. Alamat Peneliti
  - a. Alamat Kantor : Jl. Agatis Kota Palopo
  - b. Alamat rumah : Jl.Sultan Hasanuddin No.7 Kota Palopo
4. Lokasi Penelitian : Kota Palopo
5. Lama Penelitian : 7 Bulan (Mei 2015-Desember2015)
6. Biaya yang digunakan
  - a. Sumber DIPA : Rp. 10.000.000,-
  - b. Sumber lain : Tidak ada

Menyetujui:  
Kepala LP2M IAIN Palopo


Palopo, 10 Desember 2015  
Peneliti,

  
Dr.Kaharuddin, M.Pd.I  
NIP. 197010301999031003

  
Dra.Fatmaridah Sabani, M.Ag.  
NIP.196902082000032001



Mengetahui,  
Rektor IAIN Palopo

  
Dr.Abdul Pirol, M.Ag.  
NIP.196911041994031004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Program tersebut juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5)

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>1</sup> Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>2</sup>

Kebijakan Pendidikan Gratis Pemerintah Provinsi Sulsel itu kemudian resmi diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2009 yang kemudian diikuti dengan penanda tangan nota kesepahaman dengan 24 pemerintah kabupaten/kota di Sulsel. Dalam penandatanganan MOU antara Pemprov dan Pemda/Pemkot disepakati alokasi dana pendidikan gratis untuk tingkat SD – SMP sebesar 60 : 40 %. “Peraturan Gubernur No. 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Gratis Tingkat SMA.” Bukan hanya itu pendidikan gratis pun mulai merambat dan berimbas positif hingga ke tingkat Perguruan Tinggi dengan alokasi anggaran 18 %, setelah sukses dengan pelaksanaan pendidikan gratis untuk tingkat Sekolah Dasar

---

<sup>1</sup> Nafsiah Mboi, Arief Rahman, Widaninggar Wijayanti, Adhi Santika dan Hasnah Gasim, *Kompedium Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif*, (Jakarta, IDP Norway, Braillo Norway dan IDPN Indonesia atas nama UNESCO Jakarta dan Plan Indonesia, edisi keempat, 2010)

<sup>2</sup>Sekretariat Negara RI., *Undang-undang RI.Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Cet. Ke II; Jakarta: Visimedia, 2007)



(SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) kini ada SPP gratis untuk mahasiswa baru di semua PT yang ada di Sulawesi Selatan.

Kota Palopo sebagai salah satu Kota yang mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan gratis dengan berdasar kepada Peraturan Daerah no. 11 tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan pendidikan gratis di kota Palopo telah dilaksanakan sekitar 8 tahun. Namun dalam aplikasi pelaksanaan peraturan yang diberlakukan memberi problema-problematik pendidikan meskipun sisi lain menguntungkan salah satu pihak. Namun dari segi pihak penyelenggara sekolah, siswa hingga paradigma masyarakat yang tidak melihat secara menyeluruh dan bijak sehingga dapat mempengaruhi manajemen sekolah dan sikap yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan dalam implementasinya di lapangan. Kegagalan demi kegagalan antara lain disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga pendidikan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dan

penanganan masalah bukan oleh ahlinya, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan. Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan.

Terjadi masalah dalam proses penyelenggaraan, persoalan dana pendidikan untuk sekolah gratis mulai terasa. Ketika kegiatan belajar-mengajar berjalan. Di sinilah terlihat, bahwa tak ada pendidikan yang gratis. Kegiatan dan sarana infrastruktur apapun, tentunya membutuhkan biaya. Tak dapat dipungkiri, bahwa kualitas peserta didik dan tenaga pendidik, harus ditunjang oleh faktor dana. Meski demikian, sesuai falsafah dunia pendidikan, faktor dana bukanlah satu-satunya penentu kegiatan belajar-mengajar. Mamperoleh pendidikan gratis ini merupakan hak setiap masyarakat.

Indikator gratis bukanlah untuk golongan mampu akan tetapi adalah golongan menengah kebawah. Pendidikan gratis tersebut di mulai dari pendidikan dasar hingga menengah akhir. Hal ini sesuai dengan amanat Departemen Pendidikan Nasional yang akan mewujudkan pendidikan gratis untuk tingkat dasar sampai akhir. Hal ini harus kita sambut dengan baik. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarananya. Sedangkan masyarakat

memberikan dukungan dengan terselenggarakannya pendidikan tersebut.

### **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Palopo ?
2. Bagaimana sasaran kebijakan pendidikan gratis di Kota Palopo di implementasikan.
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Palopo sejak tahun 2008-2015

### **C. Pembatasan Masalah**

Pendidikan gratis yang menjadi obyek penelitian, ruang lingkupnya dibatasi pada aspek pelaksanaan dan implementasi, sehingga penelitian ini akan bersifat evaluatif. Peneliti melakukan kegiatan verifikasi dan mengevaluasi program pendidikan gratis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di kota Palopo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Palopo ?
2. Bagaimana sasaran kebijakan pendidikan gratis di Kota Palopo di implementasikan
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Palopo sejak tahun 2008-2015

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan, khususnya bagi pemerintah daerah di dalam menetapkan kebijakan pendidikan gratis. Bagi masyarakat, diharapkan memberi informasi dan memahami makna pendidikan gratis sehingga terbangun pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang pendidikan gratis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Kajian Riset Sebelumnya***

Penelitian yang secara khusus mengkaji kebijakan pendidikan gratis di kota Palopo sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun demikian, tidak berarti bahwa masalah pendidikan gratis tidak pernah dikaji atau dibahas. Beberapa peneliti telah membahas masalah pendidikan gratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruswati Luthfiah, pada tahun 2013 yang berjudul: *Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis 12 Tahun pada SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sumbawa Barat*. Ruswati menyimpulkan bahwa masyarakat sangat merespon pendidikan gratis, tetapi penelitian juga menunjukkan dari segi konteks, masih rendahnya partisipasi masyarakat di dalam mendukung kegiatan pendidikan gratis.

Penelitian lain dilakukan oleh Miftahuddin pada tahun 2009 tentang *Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)*.

Miftahuddin menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan peraturan walikota Semarang nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang kurang efektif, karena adanya ketidaksesuaian dengan harapan pembuatan kebijakan.<sup>3</sup>

Kedua penelitian di atas membahas tentang kebijakan pendidikan yang terkait dengan pendidikan gratis. Penelitian pertama membincang respon masyarakat terhadap pendidikan gratis, sedangkan penelitian yang kedua membahas tentang kebijakan pendidikan yang tertuang melalui peraturan pendidikan. Dari segi materi penelitian, kedua penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, tetapi dari segi perspektif terdapat perbedaan substansial. Perbedaan yang dimaksud adalah aspek evaluasi program yang menjadi fokus penelitian ini.

## **B. Konsep Evaluasi Program**

Bagaimanakah kita mengartikan “evaluasi”? defenisi yang dituliskan dalam kamus *Oxford evaluation; the making of a judgement*

---

<sup>3</sup>Miftahuddin, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)*, Jurnal Internasional manajemen Pendidikan, Tahun 2009.

*about the amount, number, or value of something.* <sup>4</sup> maknanya adalah suatu upaya untuk membuat penilaian tentang jumlah atau nilai sesuatu. Pengertian ini mengindikasikan bahwa dalam membuat suatu evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suchman dalam Suharsimi Arikunto memandang bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.<sup>5</sup>

Defenisi lain yang diungkapkan oleh Stufflebeam mengatakan bahwa Menurut Stufflebeam, evaluasi adalah *the systematic and objective determination of the worth or merit of an object.* <sup>6</sup> Istilah *merit* dijelaskan sebagai *Merit*, yaitu: *The excellence of an object as assessed by its intrinsic qualities or performance.*<sup>7</sup> Adapun istilah *Worth*, yaitu: *The value of an object in relationship to a purpose.*<sup>8</sup> Dalam hal ini,

---

<sup>4</sup> *Oxford Dictionari*, edited by: Victoria Bull (AS. Oxford university Press. United kingdom 2011) h. 151

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman teoritis Praktis bagi mahasiswa dan Praktisi Pendidikan.* (Jakarta, Cet. Kedua Bumi Aksara, 2009) h. 1

<sup>6</sup>Daniel L. Stufflebeam, George F. Madaus and Thomas Kellaghan, *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*, (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000), h. 29

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

ada dua hal yang dievaluasi secara sistematis dan obyektif, yaitu nilai apa yang dimiliki oleh obyek tersebut serta keunggulan apa yang telah tercapai di dalamnya. Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang proses terlaksanannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

*The Stanford Evaluation Consorsium Group* dalam Suharsimi Arikunto dkk, menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program.<sup>9</sup>

Satu pengertian pokok yang terkandung dalam evaluasi adalah adanya standar, tolok ukur, atau criteria. Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan criteria, agar dapat

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.* h. 5



diketahui seerapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan criteria sebagai kondisi yang diharapkan.

Dalam bidang manajemen, mengevaluasi tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan yang bermula dari perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, dalam manajemen suatu organisasi selalu ada sebuah unit yang dikenal dengan monitoring dan evaluasi. Unit tersebut bertugas memonitor dan mengevaluasi tingkat kesesuaian antara proses kegiatan dengan rencana yang dibuat dan seberapa tinggi pencapaian dari proses tersebut.

Program adalah realisasi dari suatu kebijakan merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Repository.usu.ac.id/bitstream

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Apabila program ini dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Ada tiga pengertian penting dalam menentukan program, yaitu; 1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 2. Terjadi dalam waktu yang relative lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.<sup>11</sup>

Program adalah system. Sedangkan system adalah satu keatuan dari beberapa bagian komponen program yang saling kait-mengait dan bekerja sama satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam system.

Evaluasi program adalah pengumpulan informasi pendukung bagi pembuatan keputusan program.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto dan Cipi Syafruddin, *Op.Cit.* h.4

<sup>12</sup>Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Yokjakarta Erlangga 2007) h. 55

Pandangan yang berbeda dari Albert Roberts dan Gilbert J. Greene bahwa evaluasi program merupakan penerapan metode riset social ilmiah untuk mengakses perencanaan, pelaksanaan hasil program dan intervensi social.<sup>13</sup>

Defenisi yang terkenal untuk evaluasi program dikemukakan oleh Ralph Tyler dalam Suharsimi Arikunto bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan.<sup>14</sup>

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan criteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah di bakukan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

---

<sup>13</sup> Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Social Workers Desk Reference*, diterjemahkan oleh Juda Damanik dan Chyntia Pattiassina dengan Judul Buku, *Buku Pintar Pekerja Sosial* (Cet. I Jakarta : Gunung Mulia 2009) h. 473

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan, Op.Cit.* h. 5

menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan public dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negative. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya; baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan masyarakat.

Kebijakan pendidikan gratis merupakan kebijakan pemerintah yang dicanangkan untuk memudahkan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu mencapai kesetaraan pendidikan sebagaimana cita-cita pendidikan Indonesia. Sebagai program pemerintah, pelaksanaannya di dunia pendidikan menjadi tantangan bagi para pengelola pendidikan, karena di dalam pelaksanaannya melibatkan aspek anggaran dana yang besar.

Penelitian tentang kebijakan pendidikan gratis, sebagai penelitian evaluatif menggunakan beberapa perspektif. Perspektif teori menjadi instrument untuk melakukan bedah analisis terhadap kebijakan dan praktik pendidikan gratis. Secara umum, penelitian ini menggunakan perspektif manajemen untuk melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan layanan program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah daerah kota Palopo.

Setiap kegiatan manajemen akan dikatakan sempurna jika dalam prosesnya dilaksanakan suatu evaluasi, tidak terkecuali dalam manajemen pendidikan. Program pendidikan sebagai perencanaan pendidikan harus dievaluasi dengan seksama, menggunakan strategi yang tepat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi terhadap program pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program pendidikan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan informasi sebagai masukan untuk menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

### ***C. Pendidikan Gratis dan Indikator Pendidikan Gratis***

#### ***1. Pendidikan Gratis***

Komitmen bangsa Indonesia terhadap pendidikan dengan sangat jelas tercermin pada konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Skema pembiayaan pendidikan oleh pemerintah tersebut diatur pada ayat 4 yang berbunyi :

“ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Pasal ini disahkan dalam amandemen keempat UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dan menjadi landasan konstitusional yang sangat kuat bagi penganggaran pendidikan nasional di era otonomi daerah.<sup>15</sup>

Berbagai regulasi memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah beserta konsekwensinya, termasuk penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; namun khusus untuk pendidikan dasar Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayainya serta pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2, Pasal 34 Ayat 2, dan Pasal 46 Ayat 1). Artinya, pendidikan dasar itu gratis bagi semua warga negara Indonesia.

---

<sup>15</sup>Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, (Cet. 3 Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 216

Apakah sebenarnya pendidikan gratis itu? Beberapa rumusan pengertian pendidikan gratis yang bisa digunakan yakni; Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga Negara sebagaimana amanat UUD 1945.

Penyelenggaraan pendidikan gratis adalah segala pembebasan biaya bagi peserta didik dan orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Pendidikan gratis yang dikeluarkan pemerintah diaplikasikan dalam program BOS dan BOSDA yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun maupun Wajib belajar 12 tahun yang bermutu.

Wikipedia, ensiklopedia gratis, menyebutkan pendidikan gratis sebagai pendidikan yang diberikan kepada siswa tanpa pungutan biaya. Akan tetapi, siswa mungkin tetap mempunyai pengeluaran untuk mendapatkan pendidikan gratis, seperti buku dan bahan ajar lain. Pendidikan gratis dapat pula diberikan kepada siswa dalam bentuk beasiswa atau hibah yang menutup semua atau hampir semua pengeluaran<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/free%5Feducation>

*The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) menyatakan bahwa salah satu tujuan *Education for All* (EFA) adalah bahwa sekolah mesti bebas dari pungutan. Ini berarti bahwa orangtua tidak perlu membayar iuran sekolah agar anaknya pergi ke sekolah. Selain itu, orangtua tidak perlu membayar berbagai pengeluaran lain yang membuat anak-anak miskin tidak bersekolah. Pengeluaran tersebut antara lain membeli buku teks, biaya partisipasi dalam kegiatan olahraga, dll.<sup>17</sup>

Dengan demikian kebijaksanaan pendidikan gratis oleh beberapa daerah dapat dilakukan namun tidak secara umum, tetapi harus lebih spesifik. Umpamanya untuk sekolah-sekolah negeri dari tingkat dasar sampai sekolah menengah atas bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu diterapkan kebijaksanaan pendidikan gratis dalam arti bebas biaya spp dan buku-buku ajar serta biaya-biaya lainnya. Kebijakan ini dikaitkan dengan kebijaksanaan wajib belajar 12 tahun. Kebijaksanaan seperti ini seharusnya menjadi kebijaksanaan nasional, tidak hanya merupakan kebijaksanaan bagi daerah-daerah yang kebetulan memiliki kelebihan kekayaan sumber-sumber daya alam, khususnya sumber-sumber daya energi.

---

<sup>17</sup>[http://www.lpmmpsulsel.net/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:gratis&catid=42:widyaiswara&Itemid=206](http://www.lpmmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=199:gratis&catid=42:widyaiswara&Itemid=206)



Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini juga berlaku sama di semua daerah di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan gratis Kota Palopo tahun anggaran 2015 bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang Tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis tingkat SD, MI, SMP, MTs, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintahan Kota Palopo. Tujuan dan sasaran program pendidikan gratis di Kota Palopo adalah:

1. Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik, pemberian insentif pendidik dan tenaga kependidikan, serta tambahan biaya operasional sekolah.
2. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul.

Adapun sasaran program pendidikan gratis adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta se-Kota Palopo.<sup>18</sup>

Dengan demikian Pendidikan Gratis dilaksanakan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri maupun swasta yang berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia wajib belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Pendidikan Gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik.

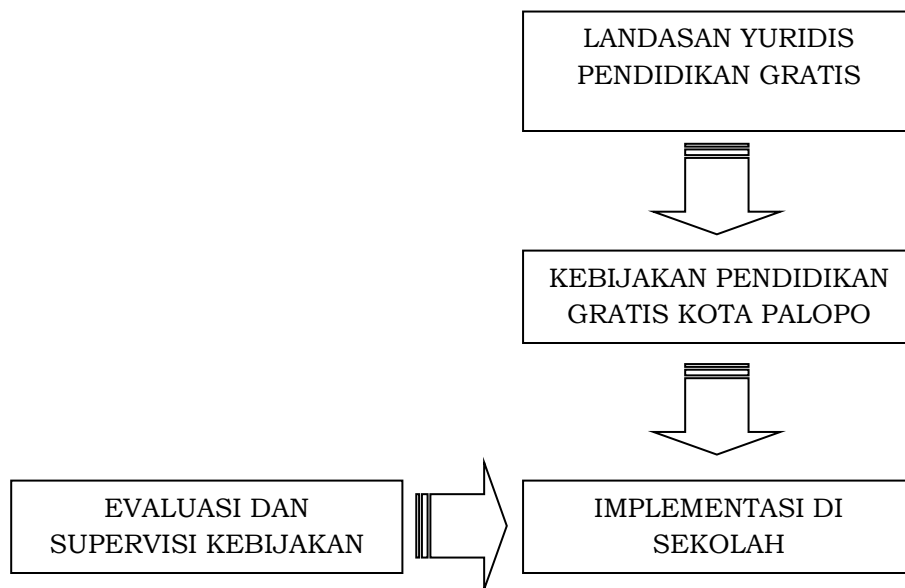
#### **D. Kerangka Pikir**

Pendidikan gratis merupakan kebijakan strategis yang dicanangkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat sehingga seluruh warga masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara maksimal.

---

<sup>18</sup> Sekretariat Daerah Kota Palopo, *Peraturan Walikota Palopo, Nomor: 6 Tahun 2015, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015.*

Pelaksanaan pendidikan gratis tentu saja harus dikawal oleh seluruh elemen baik itu pemerintah, masyarakat maupun stakeholder yang terlibat dan bertanggungjawab di dalam kegiatan pendidikan. Olehnya itu, kebijakan pendidikan gratis membutuhkan system evaluasi yang tepat sehingga pelekasanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersbut dapat digambarkan dalam bagan kerangka piker sebagai berikut.



Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Adapun model evaluasi yang digunakan adalah model *CIPP* yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Dia mengembangkan model evaluasi dengan mengikuti pola Context (C), Input (I), Proses (P), dan Produk (P). Keempat kata tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan.

Evaluasi konteks (*context evaluation*) merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (*rationale*) dalam penentuan tujuan. Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (*goal*). Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek

Evaluasi Input (*input evaluation*) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan

program. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pendidikan gratis di Kota Palopo.

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan disebut dengan evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas dimonitor secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian penting dilakukan karena berguna pada pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan dan menentukan kekuatan dan kelemahan program.

Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) Evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan dan menilai pencapaian program.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini ada dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan berorientasi tujuan, adalah salah satu pendekatan di mana fokusnya adalah untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan dari praktik atau kegiatan pendidikan oleh kelompok sasaran atau mengukur hasil pelaksanaan program/kegiatan. Tingkat kecocokan antara tujuan dengan hasil menunjukkan tingkat keberhasilan program atau kegiatan. Langkah-langkah dalam evaluasi yang berorientasi pada tujuan:

- a. Pemilihan tujuan yang dapat diukur.
- b. Pemilihan instrumen.
- c. Pemilihan desain evaluasi.
- d. Pengumpulan dan analisis data.
- e. Interpretasi hasil.

2. Pendekatan berorientasi pada partisipan, adalah pendekatan bersifat holistik atau menyeluruh, menggunakan aneka instrumen dan aneka data, agar diperoleh pemahaman yang utuh dan sudut pandang dan nilai-nilai yang berbeda tentang pelaksanaan pendidikan menurut perspekti atau sudut pandang para partisipan.

### **C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Untuk pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan kota Palopo sebagai wilayah pelaksanaan kegiatan penelitian, dengan unit analisis meliputi; pemerintah kota Palopo, anggota DPRD Kota Palopo, birokrat pelaksana di bidang pendidikan, serta beragam aspek yuridis tentang pendidikan di kota Palopo.

### **D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan data**

Mengacu pada kategori penelitian ini sebagai penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari nara sumber atau informan melalui wawancara dan hasil studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku pendukung yang mempunyai relevansi dengan tema kajian yang dibahas.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui Wawancara (*Interview*), yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait di

lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang real tentang kebijakan terkait dengan pendidikan gratis.

2. Data Sekunder, diperoleh dengan :

a. Dokumentasi

Data yang terdokumentasi digunakan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan seperti naskah peraturan daerah, surat perintah, surat keputusan serta berbagai produk peraturan lainnya. Pengumpulan dan penelaahan terhadap dokumentasi sangat penting untuk menguatkan hasil penelitian.

b. Akses internet; yang memungkinkan diperoleh data pendukung

#### **E. Teknik Analisis Data**

Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif. Data yang dianalisis adalah data kualitatif, baik berupa hasil olah dokumen, wawancara maupun hasil observasi. Dalam pelaksanaannya, analisis data kualitatif bertujuan pada proses penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah :

1. Mereduksi Data, pada tahapan ini yang dilakukan adalah memilih dan memilah mana yang sesuai atau sekelompok dengan kelompok



variable atau penggolongan kategori yang telah dibuat sebelumnya dan harus mengacu pada tujuan evaluasi program yang telah ditentukan.

2. Display Data, data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga dengan data lainnya.

3. Menafsirkan Data. Pada tahapan ini peneliti melakukan klarifikasi istilah-istilah yang dipakai dalam berkomunikasi.

4. Menyimpulkan dan Verifikasi. Tahapan ini dilakukan dengan mengecek kebenaran dari apa yang telah ditafsirkan kemudian disimpulkan. Untuk mengecek kebenaran tersebut peneliti melakukan verifikasi untuk mengecek kembali apakah semua data telah tercakup dalam kegiatan analisis dan penafsiran, apakah penafsirannya telah sesuai, apakah perlu ada konfirmasi pada sumber data, apakah perlu perbaikan format tafsiran, atau perlu data aubentuk gambarpendukung untuk memperkuat .

5. Narasi Hasil analisis. Tahapan ini dilakukan untuk menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis.

#### ***F.Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Alat pengumpul data yang digunakan adalah:

- a. Peneliti sebagai instrument utama.
- b. Pedoman wawancara, yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, dan berdasar pada pedoman tersebut dilakukan kegiatan wawancara.
- c. Daftar *check list*, yaitu menyusun daftar dokumen dari data yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan *cross check*.

### **J. Alokasi Biaya dan Jadwal Penelitian**

#### **Rencana Jadwal Penelitian**

No .	KEGIATAN	Bulan						
		Mei	jun	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop
1	Penyusunan proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Persiapan dan Pengumpulan Data Awal							
4	Pengumpulan Data							
5	Pengolahan dan Analisis Data							
6	Membuat draft laporan							
7	Seminar hasil							
8	Penyempurnaan laporan & pengesahan							
9	Penggandaan laporan hasil							

Adapun rincian biaya penelitian meliputi:

1. Belanja Bahan	: Rp. 3.250.000,-
2. Belanja Barang Non Operasional lainnya	: Rp. 1.750.000,-
3. Belanja Jasa Profesi	: Rp. 2.500.000,-
4. Belanja Perjalanan	: Rp. 2.500.000,-
5. Honor Peneliti	: Rp. 5.000.000,-
Jumlah Total biaya	: Rp. 15.000.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah)	

***K. Analisis Kompetensi Peneliti***

Sebagai akademisi yang bergelut di bidang pendidikan, penelitian ini sangat relevan dengan bidang dan latar belakang peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Kota Palopo**

##### **1. Letak Geografis**

Secara geografis Kota Palopo terletak antara 2°53'15" – 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" – 120°14'34" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan keberadaannya sebagai daerah pesisir pantai, ini menunjukkan bahwa sekitar 2,85 % dari total luas daerah Kota Palopo merupakan daerah ketinggian 0-500 m, dari permukaan laut, 24,76 % terletak pada ketinggian 501- 1000 m dan sekitar 12,39 % yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m.

Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. ada tiga kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Sendana dengan luas 37,09 km<sup>2</sup>, Kecamatan Mungkajang dengan luas 53,80 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Wara Barat 54,13 km<sup>2</sup>, sedangkan enam kecamatan lainnya sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, yakni Kecamatan Wara Selatan dengan luas 10,66 km<sup>2</sup>, Wara dengan luas 11,49 km<sup>2</sup>, Wara Timur dengan luas 12,08 km<sup>2</sup>, Wara Utara dengan luas 10,58 km<sup>2</sup>, Bara dengan luas 23,35 km<sup>2</sup> dan Tellu Wanua dengan luas wilayah 34,34 km<sup>2</sup>.

Kesan selanjutnya dari segi luas nampak bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km<sup>2</sup> dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km<sup>2</sup>.<sup>19</sup>

## **2. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Palopo**

Pemerintah Kota Palopo melaksanakan pembangunan dengan Visi, misi dan strategi, sebagai berikut:

### **a. Visi:**

Menjadi Kota Pelayanan Jasa terbaik di Kawasan Indonesia timur.

---

<sup>19</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Palopo, *Palopo dalam Angka 2014*,

**b.Misi:**

1. Menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayan jasa terbaik dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai kota yang damai aman dan tentram bagi kegiatan politik, ekonomi, social budaya, agama, pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara.

**c. Strategi Pembangunan kota 7 dimensi**

## 1. Kota Religi

Terciptanya suasana damai, aman dan tentram bagi pemeluk agama untuk menjalankan dan mengembangkan syariat agamanya masing-masing.

## 2. Kota Pendidikan

Terciptanya sumber daya manusia Kota Palopo yang handal, terampil professional dan mandiri dalam menggali, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia dan alam sekitarnya.

## 3. Kota olahraga

Terciptanya sumber daya manusia masyarakat Kota Palopo yang sehat rohani dan jasmani melalui kegiatan olahraga yang

terprogram dan terarah, serta melahirkan atlet-atlet olahraga yang berprestasi tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### 4. Kota Adat / Budaya

Terciptanya kegiatan pengalihan dan pengembangan adat dan budaya Luwu dalam etika bermasyarakat dan dalam memelihara penegakan hukum dan pelestarian lingkungan hidupnya.

#### 5. Kota Dagang

Terciptanya Kota Palopo sebagai Kota pelayanan jasa perdagangan yang tertib, aman dan simpatik penuh kemudahan yang di minati oleh dunia pedagang local, regional, nasional dan internasional. Mendorong gairah pelaku ekonomi dalam menanamkan dan mengembangkan investasi di Kota Palopo.

#### 6. Kota Industri

Menciptakan karakter masyarakat yang berorientasi pada produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber local serta memfasilitasi lahirnya sentra-sentra industri di tingkat bawah dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. Menciptakan tata ruang industri yang memungkinkan ruang investasi industri di Kota Palopo.

## 7. Kota Pariwisata

Menciptakan karakter masyarakat yang sadar wisata dan menciptakan suasana dan bentuk pelayanan yang ramah terhadap para pelaku wisata dalam rangka mengembangkan, mempromosikan dan melakukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang sesuai dengan etika.

Sejalan strategi pembangunan Kota Palopo adalah Kota Tujuh Dimensi, dengan menempatkan prioritas kedua adalah sebagai Kota Pendidikan, seperti halnya dengan daerah lainnya juga mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan dari sektor lainnya.

### **B. Pendidikan Gratis di Kota Palopo Tahun 2008-2015**

Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004,



tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Ini berarti bahwa tugas dan beban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat, terutama bagi daerah yang kemampuan diri (*capacity building*) dan sumber daya pendidikan sangat kurang. UU No. 32 tahun 2004 pada dasarnya mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan-pembinaan, agar permasalahan yang muncul dapat diminimalisir.

Pemkot Palopo satu-satunya kota yang mengklaim diri sebagai kota pendidikan. Wajar saja karena di sana terdapat beberapa perguruan tinggi selain sekolah unggulan yang diminati siswa dan mahasiswa dari luar Palopo. Ada 30.000 mahasiswa mengenyam pendidikan di kota sagu ini.

Palopo memang dikenal kota damai, indah sejahtera dan aman. Ikon pendidikan gratis sudah menjadi komitmen politik daerah jauh sebelum pemerintah provinsi menjadikan program unggulan. Ini merupakan *grand strategi* yang akan mengangkat Palopo dalam konteks membangun dimensi religi, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan manusia. Tidak heran kalau Palopo menjadi

kota tujuan pendidikan dengan melihat Angka Partisipasi Murni (APM) masuk 8 besar se-Indonesia berdasarkan Rapenas.

Hingga tahun 2012, APM SD/MI menunjukkan angka 91,02 persen. Ini berarti jumlah siswa dengan usia 7-12 yang bersekolah di SD/MI sebanyak 91,02 persen dari total jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh SMP/MTs dimana angka APM tercatat sebesar 66,78 persen yang artinya masih terdapat 33,22 persen dari total jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak/belum melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTs. Angka APM SMA/MA/SMK pada tahun 2012 yang sebesar 72,18 persen mencerminkan jumlah siswa dengan usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK sebanyak 72,18 persen dari total jumlah penduduk usia 16-18 tahun sehingga masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun sebesar 27,82 persen yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/MA/SMK.

Sejalan program gubernur, dana sharing kota palopo 60% -40% sudah berjalan baik. Memang, pendidikan gratis tidak menjamin terciptanya pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Namun senantiasa ada usaha untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Bahkan untuk memberikan spirit pendidikan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palopo telah menjadikan wilayahnya

sebagai pusat pendidikan di Luwu Raya. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Kota Palopo sebagai salah satu Kota yang mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan gratis dengan berdasar kepada Peraturan Daerah No. 11 tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan pendidikan gratis di kota Palopo telah dilaksanakan sekitar 8 tahun. Dalam perumusan kebijakan pendidikan gratis di Kota palopo menurut mantan Wakil Walikota Palopo periode 2008-2012 Bapak H. Rahmat Masri Bandaso menjelaskan bahwa pendidikan gratis merupakan implementasi dari program yang ditawarkan oleh pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan ketika melakukan kampanye pada masyarakat.

“Pencanangan pendidikan gratis di Kota Palopo dimulai pada tahun 2008. Hal ini sejalan dengan program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus di Kota Palopo, program pendidikan gratis dilaksanakan secara bertahap. Tahap I adalah untuk siswa SD, MI dan SMP/MTs., sedangkan Tahap II untuk SMA/MA dan sederajat. Yang dimulai

pada tahun 2012. Tahap berikutnya diproyeksikan untuk Pendidikan Tinggi dan PAUD.”<sup>20</sup>

Kepala Dinas Pendidikan bapak Akram Risa, S.pd. M.Si menjelaskan “bahwa pendidikan gratis pada periode sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2008 dengan dua tahap. Tahap I bagi peserta didik pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs dan tahap II pada tahun 2012 untuk SMA/MA dan SMK sederajat”<sup>21</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara bersama anggota DPRD Kota Palopo, bapak Harisal A. Latief, S.Pi menyatakan pula bahwa “pendidikan gratis saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota No. 6 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015, yang pelaksanaannya masih di dasarkan pada Peraturan Daerah yang dibuat oleh pejabat pada periode yang lalu.”<sup>22</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh beberapa kepala sekolah sebagai penanggungjawab terlaksananya pendidikan gratis di sekolah mereka, antara lain, Ibu Nurjannah, S.Pd, M.Pd beliau menjabat

---

<sup>20</sup> Rahmat Masri Bandaso mantan Wakil Walikota Palopo *Wawancara* Tanggal 20 Agustus 2015

<sup>21</sup> Akram Risa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo *Wawancara* Tanggal 9 Oktober 2015

<sup>22</sup> Harisal A. Latief, S.Pi, Anggota DPRD 2013-2018, *Wawancara*, Tanggal 29 Oktober 2015

sebagai bendahara program pendidikan gratis di SDN. 29 Songka, menyatakan bahwa; “Program pendidikan gratis terlaksana di SD. Negeri 29 Songka sejak tahun 2008, sudah 8 tahun sekolah ini melaksanakan pendidikan gratis tersebut ”<sup>23</sup> Hal senada disampaikan pula oleh bapak Nursadik, S.Pd Kepala Sekolah SD Islam Pesantren Datok Sulaiman bahwa Program pendidikan gratis sudah ada di sekolah ini sejak tahun 2008 sampai sekarang.

Mustami, S.Pd. M.Pd yang menjabat sebagai kepala sekolah SMP Datok Sulaiman mengungkapkan bahwa; “ Sejak adanya dana gratis yang diperuntukkan kepada setiap sekolah kurang lebih 8 tahun, bisa dikatakan perantara setengah tahun dari sekolah negeri, karena sekolah ini adalah sekolah swasta”<sup>24</sup>

Aisah, S.Pd sebagai tenaga pendidik pada SMP. Negeri 10 menyatakan bahwa, dana pendidikan gratis diterima sejak tahun 2008.<sup>25</sup>

Pernyataan yang diungkapkan pada hasil wawancara tergambar bahwa pada tahap I penerimaan dana pendidikan gratis

---

<sup>23</sup> Nurjannah, Bendahara Pendidikan Gratis di SDN 29 Songka Kota Palopo, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2015.

<sup>24</sup> Mustami, Kepala Sekolah SMP Datok Sulaiman, *Wawancara*, 22 Oktober 2015

<sup>25</sup> Aisah, Tenaga Pendidik SMP. Negeri 10 Kota Palopo, *Wawancara*, 22 Oktober 2015

memang diperuntukkan pada peserta didik SD dan SMP sesuai dengan rencana pemerintah Kota, melaksanakan program pendidikan gratis dengan cara bertahap. Adapun untuk tingkat pendidikan menengah baru dimulai pada tahun 2012/2013.

Sesuai dengan pernyataan bapak wakil kepala sekolah SMA 2 Kota Palopo Drs. Basman, SH., MM. bahwa di sekolah kami pendidikan gratis dimulai sejak tahun 2013 sampai sekarang. Ungkapan yang senada dinyatakan oleh bapak H. Ansar, S.Pd. yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA 4 Kota palaopo bahwa; “Proses pendidikan gratis dilakukan sudah sejak tiga tahun terakhir ini dari 2013 sampai dengan 2015” “Pada tahap II inilah program pendidikan gratis dilaksanakan pada tingkat SMA/SMK dan MA . Pendidikan gratis paripurna mulai tingkat SD sampai tingkat SMA/SMK/MA se- Kota Palopo mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2013/2014. Dan Pemerintah menyiapkan anggaran senilai 44,6 Miliar untuk memuluskan program pendidikan gratis paripurna tersebut.”<sup>26</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah

---

<sup>26</sup> Akram Risa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo *Wawancara* Tanggal 9 Oktober 2015.

yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Sulawesi Selatan. Program ini telah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Palopo sejak tahun 2008 untuk tahap I yang ditujukan kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs Negeri maupun Swasta. Untuk tahap II pelaksanaan pendidikan gratis dimulai tahun 2012/2013 ditujukan kepada peserta didik SMA/SMK dan MA. Pelaksanaan Pendidikan gratis paripurna mulai tingkat SD hingga SMA/SMK se-Kota Palopo mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah di mana siswa tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama. Sementara itu, untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemda, misalnya, biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain seperti *study tour*.

### **C. Implementasi Sasaran dan Tujuan Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Palopo**

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan

pendidikan di masyarakat dilakukakn dengan berbagai program yang memungkinkan terwujudnya pendidikan yang berkualitas tersebut. Hanya saja kemampuan masing-masing daerah untuk memaksimalkan program layanan pendidikan itu belum merata, beberapa daerah mengalami kendala khususnya masalah biaya pendidikan. Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi mengalokasikan dana pendidikan lebih tinggi sedangkan daerah-daerah yang pendapatannya rendah sering tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Berdasarkan peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan gratis Kota Palopo tahun anggaran 2015, bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang Tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis tingkat SD, MI, SMP, MTs, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintahan Kota Palopo. Tujuan dan sasaran program pendidikan gratis di Kota Palopo adalah:

1. Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik, pemberian insentif pendidik dan tenaga kependidikan, serta tambahan biaya operasional sekolah.



2. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul. Sasaran program pendidikan gratis adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta se-Kota Palopo.

Hasil wawancara mengenai tujuan program pendidikan gratis, dikemukakan oleh bapak Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, mantan wakil walikota Palopo menyatakan bahwa; “Tujuan diadakannya pendidikan gratis tentu saja disesuaikan dengan peraturan yang berlaku diantara tujuan tersebut adalah pemerataan pendidikan, menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan tentu saja meringankan beban orangtua, dan bagi pendidik mereka mendapatkan dana insentif”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Rahmat Masri Bandaso mantan Wakil Walikota Palopo *Wawancara* Tanggal 20 Agustus 2015.

Ditambahkan Rahmat bahwa “Program pendidikan gratis di Kota Palopo sesuai dengan perencanaan bahwa sasaran pencapaian program ini ditargetkan tercapai 100 persen pada tahun ketiga (2010). Alhamdulillah untuk pendidikan SD/MI dan SMP/MTs target tsb tercapai, namun untuk pendidikan SMA/SMK/MA belum tercapai 100 persen pada tahun ketiga. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia. Baru pada tahun 2012 pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dapat mencapai target sasaran seperti yang telah direncanakan. Salah satu kendala juga adalah manajemen program ini yang kurang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang tidak berjalan baik.”<sup>28</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, kepala dinas pendidikan mengatakan bahwa; “ Tujuan pendidikan gratis antara lain meringankan beban orangtua dari segi biaya, mereka tidak lagi harus membayar SPP, uang komite dan lain-lain, disamping itu dengan adanya pendidikan gratis juga ditujukan untuk pemberian dana insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang lebih utama adalah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Sasaran program pendidikan

---

<sup>28</sup> Rahmat Masri Bandaso mantan Wakil Walikota Palopo, *ibid*

gratis adalah peserta didik pada pendidikan formal mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA, baik negeri maupun swasta.”<sup>29</sup>

Senada dengan ungkapan bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, bendahara program pendidikan gratis di SDN. 29 Songka mengatakan bahwa; “ Tujuan pendidikan gratis sangat membantu proses pembelajaran di sekolah terutama bagi guru-guru honorer yang memiliki kelebihan jam pelajaran, insentif kepala sekolah, bendahara pengadaan ATK, alat kebersihan serta bahan bangunan karena sekolah sementara dalam proses rehabilitasi”<sup>30</sup>

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa “Implementasi dari dana pendidikan gratis antara lain diarahkan pada pengadaan ATK, honorarium, serta pembiayaan kegiatan misalnya; konsumsi rapat, pelatihan kepramukaan serta kegiatan UAS Realisasi dari dana pendidikan gratis dapat dilihat dari segi pembangunan rehabilitasi, kinerja guru meningkat serta kegiatan sekolah semakin banyak ”<sup>31</sup>

Hal serupa disampaikan pula oleh bapak Nursadik, S.Pd Kepala Sekolah SD. Islam Pesantren Datuk Sulaiman Palopo bahwa; “

---

<sup>29</sup> Akram Risa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo *Wawancara* Tanggal 9 Oktober 2015.

<sup>30</sup> Nurjannah, Bendahara Pendidikan Gratis di SDN 29 Songka Kota Palopo, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2015.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan gratis yaitu untuk membantu kelancaran proses pendidikan, serta meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan di sekolah” Bapak Mustami, S.Pd. M.Pd menyatakan bahwa; “Implementasi dan realisasi dari pendidikan gratis dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan anggaran yang telah ditentukan. Menurutnya realisasi tepat sasaran disalurkan sesuai dengan penggunaan dan kebutuhannya dan yang terpenting tidak membebani orang tua/wali peserta didik.” “ Tujuan pelaksanaan pendidikan gratis diimplementasikan kepada siswa, guru yang memiliki kelebihan jam, ATK, buku, LKS, ujian semester yang biayanya Rp. 50.000 / siswa dan ujian akhir nasional dengan biaya Rp. 300.000 / siswa.”

Mustami menjelaskan bahwa dana pendidikan gratis terealisasi pada semua siswa, misalnya proposal kegiatan siswa, foto ujian, ijazah, yang jelas siswa hanya erkewajiban belajar. Di Pesantren Modern Datuk Sulaiman memang berbeda dengan sekolah yang lain karena siswa-siswa di sini di asramakan, makanya mereka harus membayar *living cost* sebesar Rp. 400.000,- / siswa. Andai saja orang

tua mereka siap membawakan makanan dan kebutuhan hidup lainnya pastinya mereka hanya harus belajar saja”.<sup>32</sup>

Ibu Aisah, S.Pd seorang guru SMP Negeri 10 mengatakan bahwa; “Tujuan pelaksanaan pendidikan gratis untuk membantu kelancaran program kegiatan di sekolah, karena pendidikan gratis merupakan program rutin. Implementasi dari dana pendidikan gratis digunakan pada kegiatan rapat, pelatihan kepramukaan siswa dan kegiatan ujian akhir semester. Realisasi dapat dilihat adanya rehabilitasi bangunan, honorarium guru ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja guru, jadi ada semangat dalam beraktifitas.”<sup>33</sup>

Senada pernyataan tersebut di atas kepala sekolah SMA Negeri 2 Palopo juga menyatakan bahwa; “Tujuan pelaksanaan pendidikan gratis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dengan sasaran semua anak bisa menikmati pendidikan, namun dalam Implementasi dana pendidikan gratis relative berjalan sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Mustami, Kepala Sekolah SMP Datok Sulaiman, *Wawancara*, 22 Oktober 2015

<sup>33</sup> Aisah, Tenaga Pendidik SMP. Negeri 10 Kota Palopo, *Wawancara*, 22 Oktober 2015.

menaknisme yang ada. Realisasi dana pendidikan gratis tersebut dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ”<sup>34</sup>

Penuturan yang sama disampaikan pula oleh H. M. Anzar, S.Pd. Wakil kepala sekolah SMA. Negeri 4 Kota Palopo bahwa; “Tujuan pelaksanaan pendidikan gratis lebih diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan dengan sasaran pendidikan setiap anak bisa menikmati dunia pendidikan dan tidak ada lagi alasan anak yang tidak bersekolah karena factor biaya. Implementasi kaitannya dengan dana tersebut secara universal tidak keluar dari petunjuk pelaksanaannya dan sasaran yang seharusnya diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan. Realisasinya bahwa semua kegiatan yang dianggarkan dengan menggunakan dana tersebut tersalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah ini.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan, sasaran, dan implementasi dari dana pendidikan gratis tersebut sesuai dengan harapan pemerintah Kota Palopo, Dengan demikian pada prinsipnya dana pendidikan pendidikan gratis dapat

---

<sup>34</sup> Basman, Kepala Sekolah SMA. Negeri 2 Kota Palopo, *Wawancara*, 20 oktober 2015.

<sup>35</sup> M. Anzar, Wakil Kepala Sekolah SMA. Negeri 4 Kota Palopo, *Wawancara*, 23 Oktober 2015

juga digunakan terkait dengan kelancaran operasional sekolah. Jika menganalisis lebih jauh dari realisasi penggunaan dana tersebut tergambar bahwa dana pendidikan gratis tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dari setiap kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta yang tak kalah pentingnya adalah mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua.

Sentuhan pendidikan gratis di Kota Palopo terlihat masih terfokus pada siswa yang ada di sekolah, padahal pemerataan pendidikan dinilai sudah diimplementasikan seiring dengan penerapan pendidikan gratis 2008. Landasan lahirnya konsep pendidikan gratis disebabkan karena tingginya angka putus sekolah yang disebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam konteks pembiayaan. Namun pada realitasnya, subtansi dari pelaksanaan belum menyentuh pada wilayah anak-anak yang putus sekolah. Disini terlihat bahwa kebijakan pendidikan dan konsep pemerataan terlihat masih simpang siur dan ambiguitas, antara perencanaan dengan tujuan yang akan dicapai. Namun demikian meskipun belum menyentuh pada anak yang putus sekolah tujuan pendidikan gratis di sekolah-sekolah tersebut sudah terimplementasi.

#### **D. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kota Palopo Tahun 2008-2015**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Dan untuk mengukur efektifitas program pendidikan gratis, Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*



*approach*). Pendekatan ini memakai sasaran program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan.

Efektivitas program pendidikan gratis yang dimaksudkan untuk pemerataan mendapatkan pendidikan kepada seluruh usia belajar dan mengurangi beban masyarakat, dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat partisipasi belajar sebelum di laksanakan program pendidikan gratis dengan tingkat partisipasi belajar setelah program pendidikan gratis dilaksanakan. Artinya, apabila jumlah partisipasi belajar meningkat setelah dilaksanakan program pendidikan gratis, berarti hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut efektif. Sebaliknya, apabila jumlah partisipasi belajar tidak mengalami perubahan atau bahkan menurun setelah dilaksanakan program pendidikan gratis berarti hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis kurang/tidak efektif.

Melihat pelaksanaan pendidikan gratis di kota Palopo dapat dipahami bahwa terdapat tahapan yang secara sistematis mengarah pada implementasi pendidikan gratis yang lebih baik. Indikator hal tersebut nampak dari upaya pemerintah daerah yang terkoordinasi secara hirarkis hingga ke sekolah-sekolah. Selain itu, jenjang satuan

pendidikan yang terjangkau oleh kebijakan pendidikan gratis secara bertahap pun mengalami peningkatan hingga sekolah menengah. Kenyataan ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah untuk mewujudkan kota Palopo sebagai kota pendidikan sebagai salah satu dimensi yang akan dikembangkan secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Pembahasan yang telah dikemukakan secara panjang di bab sebelumnya, maka berikut dikemukakan kesimpulan:

1. Pendidikan gratis di kota Palopo merupakan kebijakan pemerintah daerah kota Palopo yang dilaksanakan sebagai wujud implementasi kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2009 yang kemudian diikuti dengan penanda tangan nota kesepahaman dengan 24 pemerintah kabupaten/kota di Sulsel. Pemerintah kota Palopo kemudian mengeluarkan peraturan walikota Palopo No. 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratis di Kota Palopo.

2. Sasaran kebijakan pendidikan gratis di kota Palopo telah mencakup semua jenjang satuan pendidikan. Pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dari jenjang pendidikan dasar hingga tahun 2015 telah mencapai jenjang pendidikan menengah.

3. Program pendidikan gratis di kota Palopo telah mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan, mengindikasikan bahwa program berjalan secara efektif. Indikasi efektifitas program

tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran dana pendidikan gratis di setiap tahun, dan hingga kini telah menjangkau semua jenjang pendidikan formal hingga sekolah menengah atas.

### **B. Saran-saran**

Kebijakan pendidikan gratis merupakan kebijakan strategis yang secara riil menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah tetap konsisten untuk meningkatkan dukungan bagi terlaksananya kebijakan pendidikan gratis secara baik.
2. Pemerintah daerah melakukan kajian secara mendalam tentang implementasi pendidikan gratis di sekolah, sehingga dana pendidikan gratis dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Social Workers Desk Reference*, diterjemahkan oleh Juda Damanik dan Chyntia Pattiassina dengan Judul Buku, *Buku Pintar Pekerja Sosial* (Cet. I Jakarta : Gunung Mulia 2009)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Palopo, *Palopo dalam Angka 2014*,
- Daniel L. Stufflebeam, George F. Madaus and Thomas Kellaghan, *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*, (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000)
- Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Yogyakarta Erlangga 2007)
- Miftahuddin, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)*, Jurnal Internasional manajemen Pendidikan, Tahun 2009.
- Nafsiah Mboi, Arief Rahman, Widaninggar Wijayanti, Adhi Santika dan Hasnah Gasim, *Kompedium Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif*, (Jakarta, IDP Norway, Braillo Norway dan IDPN Indonesia atas nama UNESCO Jakarta dan Plan Indonesia, edisi keempat, 2010)
- Oxford Dictionari*, edited by: Victoria Bull (AS. Oxford university Press. United kingdom 2011)
- Sekretariat Negara RI., *Undang-undang RI.Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Cet. Ke II; Jakarta: Visimedia, 2007)
- Sekretariat Daerah Kota Palopo, *Peraturan Walikota Palopo, Nomor: 6 Tahun 2015, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015*.

Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, (Cet. 3 Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010)

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman teoritis Praktis bagi mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. (Jakarta, Cet. Kedua Bumi Aksara, 2009)

<http://en.wikipedia.org/wiki/free%5Feducation>

[http://www.lpmposulsel.net/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:gratis&catid=42:widyaiswara&Itemid=206](http://www.lpmposulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=199:gratis&catid=42:widyaiswara&Itemid=206)

Akram Risa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo *Wawancara* Tanggal 9 Oktober 2015

Basman, Kepala Sekolah SMA. Negeri 2 Kota Palopo, *Wawancara*, 20 oktober 2015.

Harisal A. Latief, S.Pi, Anggota DPRD 2013-2018, *Wawancara*, Tanggal 29 Oktober 2015

M. Anzar, Wakil Kepala Sekolah SMA. Negeri 4 Kota Palopo, *Wawancara*, 23 Oktober 2015

Mustami, Kepala Sekolah SMP Datok Sulaiman, *Wawancara*, 22 Oktober 2015

Nurjannah, Bendahara Pendidikan Gratis di SDN 29 Songka Kota Palopo, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2015.

Rahmat Masri Bandaso mantan Wakil Walikota Palopo Periode 2008-2013, *Wawancara* Tanggal 20 Agustus 2015